



Pengaruh Stabilitas Keamanan Indo-Pasifik melalui AOIP terhadap Ketegangan China-Taiwan dalam Penyelesaian Sengketa Maritim

Muh. Nurfaiz Fahmi¹, Imam Fadhil Nugraha²
Universitas Hasanuddin
Email: muhnurfaizfahmi@gmail.com

Article Info

Keywords:

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), China-Taiwan, Maritime Security.

*Received 30/05/2025
Accepted 19/06/2025
Available online
30/06/2025*

Abstract

This research analyzes ASEAN's role through the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) in responding to China–Taiwan tensions that threaten regional maritime security. AOIP promotes cooperation based on inclusivity, ASEAN centrality, and respect for international law. Despite broad support from major partners like the U.S. and Japan, AOIP's effectiveness remains limited due to its non-binding nature and ASEAN's cautious stance toward China's assertiveness. Using a descriptive-analytical method, the research finds that AOIP lacks strategic tools to prevent escalation or address real-time threats. The study recommends strengthening ASEAN's collective capacity through early warning mechanisms and deeper multilateral cooperation. AOIP must evolve beyond a normative framework into a proactive platform capable of supporting regional stability and managing power rivalries in the Indo-Pacific.

A. PENDAHULUAN

Setiap kawasan di penjuru belahan dunia, mempunyai julukannya tersendiri, sama seperti halnya dari Indo-Pasifik. Menurut (Berkofsky & Miracola, 2019), Indo-Pasifik merupakan sebuah konsep yang mendapatkan atensi khusus dan menjadi sebuah peningkatan dalam sebuah wacana geostrategis dan geopolitik dan telah menjadi rujukan daripada akademisi, analis, hingga pembuat kebijakan, yang juga awalnya dikenal pada tahun 2010. Lebih lanjut, dalam mengenal istilah Indo-Pasifik, kawasan ini sebenarnya merupakan dasar dari sebuah istilah maupun gambaran dari biogeografis yang juga terdapat beberapa kawasan yang mencakup diantara wilayah tersebut, diantaranya adalah laut Samudra Pasifik Barat, Samudra Pasifik Tengah, Samudra Hindia, dan bahkan merujuk kepada Laut China Selatan yang kerap diketahui sebagai Indo-Pasifik Barat (Yadav, 2022).

Melihat berbagai perkembangan yang terdapat dalam kawasan ini, Indo-Pasifik telah banyak digunakan dalam studi hubungan internasional dalam memperkenalkan kerangka atau konsep kerja sama regional yang mencakup berbagai bidang yang diantaranya seperti bidang ekonomi, politik, perdagangan, hingga pada bermacam-macam isu militer yang pada akhirnya telah membuat Indo-Pasifik menjadi sebuah kawasan yang panas dikarenakan kompleksitasnya (Yadav, 2022). Lebih lanjut, meskipun istilah Indo-Pasifik telah mengalami popularitas pada abad ke-21, sebenarnya istilah ini telah muncul dalam abad ke-19, yang dimana jika dengan seksama melihat pada masa geopolitik kontemporer yang sekarang, terdapat sebuah klaim bahwa istilah Indo-Pasifik bermula dari sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu Shinzo Abe sebelum Parlemen India melakukannya pada tahun 2007.

Meskipun tidak adanya sebuah hak mutlak dalam kepemilikan istilah tersebut, Shinzo Abe dalam pernyataannya yang berjudul *“Confluence of the Two Seas”*, secara transparan mengatakan bahwa sudah beberapa kali terjadi dalam sejarah bahwa Jepang dan India pernah tertarik satu sama lain, oleh karena itu Jepang dan India memiliki hubungan yang kuat dan niat dalam membentuk sebuah kemitraan yang strategis agar lebih memperluas dan memperkuat hubungan diantara kedua negara (*MOFA: Speech by H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, at the Parliament of the Republic of India “Confluence of the Two Seas” (August 22, 2007)*, 2007). Bahkan, pada pidato tersebut, Shinzo Abe memaparkan dengan tegas bahwa kerja sama dalam kawasan tersebut merupakan sebuah keharusan dalam membuat aliansi yang kuat. Oleh karena hal tersebut, penting melihat bahwa kawasan Indo-Pasifik sebagai sebuah kawasan yang mencakup beragam sejarah, kepentingan, dan sistem politik yang akhirnya menjadi pusat persaingan geopolitik global diantara negara-negara besar yang juga dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan regional tersebut.

Pada bulan Juni 2018, Perdana Menteri India melakukan lawatan ke ajang *Shangri-La Dialogue* yang diselenggarakan di Singapura. Dalam kesempatan tersebut, beliau membahas tujuh unsur penting yang menjadi landasan kerja sama di yang terletak pada kawasan tersebut. Beberapa di antaranya adalah pandangan bahwa Indo-Pasifik harus menjadi kawasan yang terbuka, inklusif, dan bebas. Selain itu, ASEAN dipandang sebagai pusat dari dinamika kawasan Indo-Pasifik. Unsur lainnya meliputi pentingnya aturan yang disepakati secara bersama,

pengendalian yang efektif berdasarkan tujuan bersama yang seragam, serta akses bersama terhadap ruang laut dan luar angkasa dengan penggunaan yang minimal atau tanpa dominasi, hingga menekankan pentingnya konektivitas, globalisasi, dan kerja sama sebagai pendekatan utama, menggantikan pola pikir persaingan, terutama dalam aspek ekonomi (Yadav, 2022).

Melihat akan hal tersebut, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai organisasi yang terletak di Asia Tenggara dan berfokus kepada ekonomi dan perdamaian terhadap stabilitas regional yang berlokasi di Asia Tenggara, tentu saja tidak tinggal diam, dikarenakan wilayah mereka juga mencakup sebagai bagian dari kawasan Indo-Pasifik (ASEAN: Pengertian, Negara Anggota, Sejarah Dan Tujuan, 2022.).

Pada tahun 2019, tepatnya pada 23 Juni ASEAN melakukan sebuah pergerakan baru yang menjadi gebrakan dari visi ASEAN dalam melihat Indo-Pasifik, yaitu dengan mengadopsi pendekatan yang mereka sebut *sebagai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). AOIP sendiri adalah sebuah respon strategis dari ASEAN akibat meningkatnya situasi terhadap ketegangan geopolitik yang terjadi, sehingga pengaruh dari negara-negara yang berada di kawasan tersebut secara tidak langsung mengalami peningkatan (Lin, 2024a). Oleh karena itu, *Outlook* atas adopsi dari ASEAN bertujuan dalam memperlihatkan sentralitas ASEAN di kawasan tersebut yang berdasar kepada mekanisme di ASEAN sendiri. Tidak hanya berfokus kepada hal tersebut, akan tetapi ASEAN juga mendorong adanya kerja sama eksternal yang mencakup beberapa bidang yang diantaranya adalah ekonomi, konektivitas, maritim, dan juga pembangunan berkelanjutan, sehingga ASEAN akan tetap bisa merujuk kepada pematuhan prinsip utama mereka seperti adanya keterbukaan, inklusivitas, dan kerangka kerja yang berbasis regulasi dari kesepakatan mereka.

Berdasarkan dokumen mengenai AOIP yang telah mereka adopsi, ASEAN memegang teguh prinsip mereka melalui yang berdasar kepada penguatan ASEAN sebagai sentralitas, inklusif, transparansi, tata pengelolaan yang baik, non-intervensi, penghormatan terhadap kedaulatan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan melengkapi dalam kerangka kerja sama, hingga yang terpenting menghormati hukum internasional, seperti Piagam ASEAN, hingga yang mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan konvensi PBB, dan sebagainya (*Asean Outlook on the Indo-Pacific*,” 2021).

Sejalan dengan prinsip ASEAN yang menghormati hukum laut, tentunya UNCLOS 1982 sebagai ranah yang menjadi acuan semua negara dalam menghormati dan menaati eksistensi regulasi yang telah tertuang di dalamnya, terkhususnya ASEAN yang menjadi organisasi regional yang sentral dan sangat penting di kawasan tersebut dalam menjaga stabilitas keamanan. Sehubungan dengan hal tersebut, China dan Taiwan mengalami sebuah sengketa laut yang diawali oleh akibat perang langsung dari adanya perang saudara di China. Awalnya, pemerintah Nasionalis yang dipimpin oleh sebuah partai yang bernama Koumintang yang di dirikan oleh Sun Yat-sen, kalah dalam melawan Kekaisaran Qing dengan melakukan sebuah revolusi, sehingga partai ini melarikan diri dan mendirikan Taiwan sebagai pembaruan di China dan pada saat yang sama, mereka mendirikan pemerintahannya di pulau tersebut pada tahun 1949 (*Confrontation Over Taiwan | Global Conflict Tracker*, n.d.).

Meskipun Taiwan memisahkan diri dengan pulau yang berbeda dengan China, akan tetapi China tidak pernah mengambil kendali atas Taiwan, klaim China atas pulau tersebut hanya berdasar kepada pulau yang di klaim oleh kepemilikan Taiwan sebenarnya adalah suatu hak yang tidak dapat dicabut dari China. Oleh karena itu, China sangat menekankan bahwa pulau yang telah di klaim oleh Taiwan, harus disatukan kembali dengan daratan oleh Tiongkok, meskipun mereka harus menggunakan cara damai ataupun menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuannya.

Sebagai negara adikuasa di Indo-Pasifik, Amerika Serikat membatalkan perjanjian pertahanan mereka bersama Taiwan pada tahun 1979, yang dimana perjanjian ini telah berjalan kurang lebih selama 25 tahun yang diawali sejak tahun 1954 dibawah pemerintahan Jimmy Carter yang menghormati kebijakan China yang mereka sebut sebagai “*One China Policy*” . Meskipun Amerika Serikat menghormati bahwa kebijakan tersebut, akan tetapi Presiden Jimmy Carter menandatangani sebuah undang-undang yang disebut sebagai “*Taiwan Relations Act*” (TRA), yaitu undang-undang untuk melindungi kepentingan keamanan dan komersialnya bagi Taiwan, sehingga dapat menjaga stabilitas keamanan di Indo-Pasifik (*Taiwan Relations Act (Public Law 96-8, 22 U.S.C. 3301 et Seq.) - American Institute in Taiwan*, 2022). Lebih lanjut, meskipun TRA telah menjadi kesepakatan diantara Amerika Serikat dan Taiwan, namun TRA tidak mewajibkan Amerika

Serikat untuk membela Taiwan dan memberikan campur tangan dalam konflik tersebut.

Berbeda dengan Amerika Serikat dibawah pemerintahan Jimmy Carter pada masa tersebut. Namun, pada masa pemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat sangat gencar dalam membantu Taiwan dalam membela keamanannya. Faktanya, Amerika Serikat secara bertahap mengubah strateginya di Indo-Pasifik, yaitu dengan melihat bahwa China adalah ancaman utama dan Taiwan sebagai sasaran yang paling dominan untuk China dalam melakukan invasinya untuk mendapatkan daerah tersebut kembali menjadi kepemilikan mereka. Hal tersebut tercermin, bahwa Presiden Amerika Serikat, Joe Biden telah memberikan komitmen yang sangat kuat dan transparan untuk melakukan pembelaan dan bantuan untuk Taiwan dari ancaman invasi (*Defending Taiwan – Indo-Pacific Defense FORUM*, 2024).

Menurut (Centre for Strategic and International Studies, 2020), dalam memahami prospek keamanan nasional, keamanan nasional dibagi menjadi aspek, yaitu dengan memperhitungkan keamanan tradisional dan non-tradisional. Dalam pandangan keamanan tradisional, subjeknya berupa negara-negara, sedangkan dalam pandangan keamanan non-tradisional, umumnya berfokus pada ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh *non-state actor* (kelompok subnasional, organisasi supra-nasional, dan individu). Lebih lanjut, ada beberapa jawaban untuk menjawab mengenai keamanan nasional jika kita ingin melakukan sebuah eksplorasi yang luas.

Terdapat beberapa jawaban untuk menjawab mengenai keamanan nasional jika kita ingin melakukan sebuah eksplorasi yang luas. Dalam pandangan keamanan tradisional maupun non-tradisional, fokus utama suatu negara terdapat pada ancaman eksternal, bahkan secara keseluruhan ancaman dapat datang secara internal maupun eksternal yang meliputi militer, politik, ekonomi, siber, lingkungan, nuklir, kepentingan luar negeri, hingga pada aspek masyarakat. Dengan demikian, CSIS secara keseluruhan melihat pemeliharaan kedaulatan dan keamanan nasional sebagai tujuan dalam orientasi nilai keamanan.

Melihat adanya urgensi yang nyata hadir di Indo-Pasifik, China sebagai negara yang mendominasi hampir secara keseluruhan yang meliputi kawasan tersebut, tentu saja menyebabkan adanya ancaman secara langsung terhadap eksistensi, sehingga membatasi dominasi dan pengaruh Amerika Serikat dalam rangka menjaga stabilitas kawasan tersebut (Yadav, 2022). Pada akhirnya,

Amerika Serikat membuat aliansi agar tidak terjadinya dominasi yang mengalami tumpang-tindih di kawasan tersebut, karena hal tersebutlah Amerika Serikat membuat aliansi bersama negara-negara berkemitraan strategis dan tidak terlalu kuat, diantara negara tersebut dibuatlah kerjasama dengan ASEAN, *Quadrilateral Security Dialog* (QUAD), Australia, United Kingdom, United States of America (AUKUS), dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang berfokus di kawasan tersebut. Pendekatan ini diambil oleh Amerika Serikat agar dapat menopang posisinya di kawasan dan terjadinya *balance of power* di Indo-Pasifik.

Merujuk ke dalam buku karya Michael Sheehan dengan judul “*Balance of Power History & Theory*” , Michael Sheehan mengatakan bahwa *Balance of Power* dalam Realisme merujuk kepada perilaku negara dalam sistem internasional yang anarkis. Secara sederhana, keseimbangan kekuatan merupakan sebuah keadaan yang dimana kekuatan negara-negara relatif seimbang, sehingga tidak ada satu negara yang mampu mendominasi yang lainnya secara mutlak, sehingga keseimbangan ini tetap aman dan mencegah dominasi satu kekuatan yang dapat mengancam keberadaan mereka (Giri, 1996.).

Oleh karena itu, pada tahun 7 September, 2023, ASEAN dan Amerika Serikat membuat sebuah kesepakatan yang fundamental dalam kerja sama mereka, hal tersebut tercermin dalam *AOIP and the United States’ Indo-Pacific Strategh (IPS)*, yang telah mereka sepakati dalam KTT ASEAN-Amerika Serikat ke-11 yang diadakan di Jakarta pada saat itu (*ASEAN-U.S. Leaders’ Statement on Cooperation on The ASEAN Outlook on The Indo-Pacific - ASEAN Main Portal, 2023*). Bahkan, dalam dokumen yang telah mereka buat, mereka menegaskan kembali akan pentingnya penegakan tujuan dan prinsip Piagam PBB dan Piagam ASEAN, *Declaration on Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)*, UNCLOS 1982, dan dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC), hingga kepada *AOIP*.

Melihat hal yang telah disebutkan sebelumnya dan kuatnya aliansi yang berada di Indo-Pasifik, mungkin bisa timbul suatu pertanyaan, apa Peran ASEAN melalui AOIP nya dalam menjaga stabilitas regional mereka agar tidak mengalami eskalasi lebih jauh. Dengan demikian, penelitian dari jurnal yang diangkat ini akan menelusuri lebih dalam terkait dengan bagaimana AOIP mengatasi permasalahan terkait stabilitas yang ada di Indo-Pasifik, bagaimana posisi dan penerapan UNCLOS terhadap Taiwan yang bukan merupakan anggota PBB, serta

menganalisis bagaimana motif China melakukan claim sehingga dapat bersitenggang dengan Taiwan melalui pandangan UNCLOS.

B. LITERATURE REVIEW

Melihat kompleksitas yang ada di kawasan Indo-Pasifik, terkhususnya bagaimana ASEAN dengan AOIP nya dapat menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan tersebut, hingga penerapan dan pandangan UNCLOS 1982 terhadap dua negara yang bersitenggang, ternyata masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Untuk membantu dalam menelaah lebih dalam mengenai upaya ASEAN melalui AOIP nya sehingga dapat menjaga negara stabilitas perbatasan negara lain yang juga secara tidak langsung mendapatkan ancaman akibat dari perselisihan China dan Taiwan, penulis telah mengadakan review literatur terhadap tiga penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat yang akan dikaji.

Literatur awal yang berjudul *Understanding Indonesia's role in the ' ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ' : A role theory approach*. Karya I Gusti Bagus Dharma Agastia membahas mengenai peran Indonesia dalam kerangka geopolitik regional dan global, khususnya dalam konteks Indo-Pasifik. Melalui pendekatan teori peran (role theory), studi ini menyoroti bagaimana Indonesia memposisikan dirinya sebagai aktor penting yang berusaha menyeimbangkan antara kerjasama dan kompetisi di kawasan tersebut. Indonesia dipandang sebagai kekuatan menengah yang mampu memainkan peran sebagai pemimpin regional, jembatan penghubung, dan fasilitator dalam membangun stabilitas dan kerjasama multilateral. Dalam konteks ini, Indonesia menafsirkan konsep Indo-Pasifik sebagai bagian dari identitas dan posisi strategisnya, yang diterima baik oleh aktor utama seperti China, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia. Negara-negara besar tersebut melihat Indonesia sebagai aktor yang konstruktif dan mampu mengelola peran yang sesuai dengan persepsi dirinya, sehingga memperkuat posisinya sebagai aktor yang aktif membentuk arsitektur kawasan.

Salah satu inisiatif penting yang didukung Indonesia adalah *AOIP*, yang menegaskan pendekatan inklusif dan berbasis ASEAN dalam membangun kerjasama kawasan. Indonesia mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, damai, dan stabil melalui mekanisme yang sudah ada, bukan menciptakan yang baru, dan mendapatkan dukungan dari berbagai negara besar yang melihatnya sebagai langkah konstruktif. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa

Indonesia tidak hanya berperan sebagai peserta pasif, tetapi aktif dalam membentuk dan memimpin inisiatif regional, menunjukkan bahwa negara dengan kekuatan menengah dapat memainkan peran strategis melalui diplomasi yang cerdas dan penempatan posisi yang tepat dalam dinamika geopolitik kawasan dan global (Agastia, 2020). Penulis dari jurnal ini berusaha menjelaskan peran Indonesia dalam kerangka geopolitik regional dan global, khususnya dalam konteks Indo-Pasifik. Mereka mengkaji bagaimana Indonesia memposisikan dirinya sebagai aktor penting yang mampu menyeimbangkan antara kerjasama dan kompetisi di kawasan tersebut melalui pendekatan teori peran (role theory).

Literatur kedua yang berjudul *Asean's Role in The Settlement of International Disputes on China's Aggression Against Taiwan*. Karya dari Ega Permatadani, Ida Ayu Rosida, dkk, membahas mengenai Jurnal ini membahas secara komprehensif mengenai dinamika geopolitik di kawasan Asia-Pasifik, khususnya terkait dengan ketegangan antara China, Taiwan, dan peran organisasi regional seperti ASEAN. Dalam konteks ini, China memandang Taiwan sebagai wilayah yang memberontak dan menentang kemerdekaannya, dengan kekhawatiran bahwa dukungan internasional terhadap Taiwan, terutama dari Amerika Serikat, dapat mengubah keseimbangan kekuatan global dan memperkuat pengaruh AS di kawasan tersebut. Amerika Serikat sendiri mendukung Taiwan melalui bantuan militer, yang semakin memperumit hubungan antara China dan AS serta meningkatkan risiko konflik militer di kawasan. China menunjukkan agresi militer terhadap Taiwan, termasuk tindakan yang melanggar hukum internasional dan berpotensi menimbulkan risiko keamanan seperti penggunaan senjata kimia dan nuklir, yang dapat mengancam stabilitas regional dan negara-negara tetangga. Dalam konteks ini, ASEAN berperan penting sebagai organisasi regional yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional dan perjanjian yang berlaku, seperti Piagam PBB dan perjanjian ASEAN.

Paper ini menekankan pentingnya kerjasama regional, diplomasi, dan penegakan hukum internasional dalam rangka menghalangi eskalasi pertikaian dan memelihara keamanan di Asia-Pasifik. Selain itu, artikel ini juga membahas peran ASEAN dalam menyikapi agresi China terhadap Taiwan, menyoroti pentingnya keterlibatan aktif ASEAN dalam menjaga perdamaian dan keamanan regional melalui pendekatan hukum dan norma internasional, serta menegaskan perlunya dialog dan negosiasi damai sebagai solusi utama untuk mengatasi ketegangan yang

terus meningkat di kawasan tersebut (Maulana et al., 2023). Penulis dari jurnal ini berusaha menjelaskan dinamika dan kompleksitas hubungan internasional di kawasan Asia-Pasifik, khususnya terkait konflik antara China dan Taiwan serta peran ASEAN dalam penyelesaian sengketa tersebut. Mereka menyoroti ketegangan yang meningkat akibat agresi China terhadap Taiwan dan dukungan internasional terhadap Taiwan, termasuk peran Amerika Serikat yang memperumit situasi. Selain itu, penulis menekankan pentingnya kerjasama regional, diplomasi, dan penegakan hukum internasional dalam mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan.

Literatur ketiga dengan judul *South China Sea Conflict and Security Cooperation in ASEAN Waters*. Karya Rifqi Setia Wardhana menjelaskan mengenai Jurnal ini membahas secara mendalam upaya ASEAN dalam menangani ancaman keamanan di Laut China Selatan, terutama dalam konteks klaim teritorial sepihak dan aktivitas militer yang dilakukan oleh China. Penulis menyoroti bagaimana ASEAN merespons tantangan ini melalui forum regional seperti ASEAN Regional Forum (ARF) untuk memperkuat kerjasama keamanan maritim di kawasan tersebut. Dalam analisisnya, penulis menggunakan teori sekuritisasi dan kerangka kerja kerjasama internasional untuk memahami strategi keamanan ASEAN, dengan menekankan pentingnya aksi kolektif guna menjaga stabilitas regional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan sengketa sumber daya.

Selain itu, jurnal ini juga mengulas berbagai aspek terkait sengketa di Laut China Selatan, termasuk konflik kedaulatan, tantangan keamanan, upaya diplomatik, serta peran ASEAN dan negara-negara lain seperti China, Vietnam, dan Indonesia dalam dinamika geopolitik kawasan. China dengan klaim sepihak dan aktivitas militernya menjadi ancaman utama terhadap stabilitas regional, yang mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerjasama melalui langkah diplomatik, hukum internasional seperti UNCLOS, serta pengembangan kode etik bersama dengan China. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, konflik dan ketegangan masih belum terselesaikan, menunjukkan perlunya diplomasi multilateral yang berkelanjutan agar perdamaian dan stabilitas di kawasan dapat dipertahankan (Wardhana, 2021). Penulis berusaha menegaskan bahwa keberhasilan dalam mengelola sengketa ini sangat bergantung pada kolaborasi internasional dan komitmen bersama dari semua pihak terkait.

Literatur-literatur yang telah disebutkan sebelumnya telah memberikan kontribusi yang terbilang cukup signifikan kepada penelitian penulis dalam memaparkan terkait bagaimana stabilitas keamanan Indo-Pasifik melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) dapat memengaruhi dinamika ketegangan antara China dan Taiwan, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa maritim yang lebih luas. Ketegangan tersebut tidak terlepas dari motif strategis dan kepentingan nasional China yang secara konsisten menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatannya. Klaim ini sejalan dengan pendekatan hegemonik China di Laut China Selatan, yang tidak hanya dilandasi oleh potensi sumber daya alam dan posisi strategis jalur pelayaran internasional, tetapi juga sebagai bentuk proyeksi kekuatan dan pengaruh geopolitik di kawasan. Tindakan agresif China, baik terhadap wilayah-wilayah yang disengketakan seperti Paracel dan Spratly maupun terhadap Taiwan, menunjukkan penggunaan kekuatan militer sebagai alat politik luar negeri, yang pada gilirannya menimbulkan kekhawatiran serius bagi negara-negara ASEAN.

Di tengah dinamika ini, AOIP hadir sebagai inisiatif diplomatik yang menekankan inklusivitas, transparansi, supremasi hukum, serta sentralitas ASEAN sebagai aktor utama dalam menciptakan ruang dialog dan kerja sama kawasan. Indonesia, sebagai inisiator utama AOIP, memainkan peran penting sebagai *middle power* dan *bridge-builder* dalam menavigasi rivalitas kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat, sekaligus menjaga ASEAN agar tidak terseret ke dalam konflik terbuka. AOIP menjadi wadah normatif yang berupaya menghindari polarisasi kawasan dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas berdasarkan prinsip perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Dalam konteks ini, ketegangan China-Taiwan tidak hanya dilihat sebagai konflik bilateral semata, melainkan bagian dari ancaman yang dapat mengganggu stabilitas regional secara keseluruhan, sehingga mendorong ASEAN untuk memperkuat kapasitas kolektifnya melalui mekanisme seperti AOIP. Dengan demikian, penelitian ini menelaah secara komprehensif bagaimana kepentingan strategis China terhadap Taiwan serta langkah ASEAN melalui AOIP saling berinteraksi dalam membentuk struktur keamanan maritim Indo-Pasifik yang lebih stabil, inklusif, dan bebas dari dominasi kekuatan tunggal.

C. Metode Penelitian

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian ini menggunakan sebuah metode yaitu berupa pendekatan kualitatif dengan kerangka berpikir korelasional, yang berupa menelaah hubungan yang berasal dari peran AOIP dalam menjaga stabilitas kawasan dan ketegangan China-Taiwan melalui analisis dokumen kebijakan, dan studi kasus historis. Lebih lanjut, validitas data dalam penelitian ini juga menggunakan *teknik triangulasi sumber*, yaitu dengan melakukan komparasi dan mengonfirmasi data dari berbagai dokumen resmi yang kredibel, terkhususnya seperti melalui kebijakan ASEAN yang berasal dari AOIP, artikel jurnal ilmiah, buku, serta beberapa analisis yang bersumber dari lembaga think tank regional, seperti CSIS. Dengan demikian, validitas data yang disertakan secara purposive dengan kriteria relevansi terhadap isu stabilitas Indo-Pasifik dan konflik China-Taiwan.

D. Hasil dan Diskusi

Ketegangan yang diakibatkan antara China dan Taiwan yang telah lama berlangsung sejak akhir Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1927-1949, telah menyebabkan terjadinya klaim teritorial dan disintegrasi yang membuat China melakukan claim kepada Taiwan sebagai bagian dari wilayah mereka. Hal ini berdasar kepada prinsip *One China Policy* yang diadopsi secara internasional dan mendapatkan dukungan kehormatan oleh Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Jimmy Carter. Melalui pendekatan tersebut, China terus menekankan segala macam cara mereka untuk mengambil kembali bagian dari wilayahnya, baik itu dilakukan secara damai, maupun dengan pendekatan militer untuk mengancam kedaulatan Taiwan.

Pendekatan melalui keamanan maritim melihat dengan jelas bahwa upaya China dalam melakukan ancaman semakin agresif, dikarenakan mereka secara besar-besaran melakukan klaim hingga sekarang akibat mereka masih menganggap bahwa wilayah tersebut masih di dalam yurisdiksi mereka. Oleh karena itu, mereka mengerahkan kapal penjaga pantai, hingga armada laut ke wilayah Selat Taiwan dalam rangka melakukan latihan militer dan menimbulkan ancaman kepada Taiwan, sehingga menyebabkan ketidakstabilan pada regional. Sebenarnya, menurut (UNCLOS 1982) hal ini masih tergolong sah, dikarenakan mereka masih

melakukan latihan militer di wilayah yurisdiksi mereka sendiri, hal tersebut juga didukung dengan jejak historis yang dimiliki oleh China.

Dengan demikian, lahirlah AOIP sebagai arah ASEAN dalam menjaga stabilitas di Indo-Pasifik, dengan pendekatan berupa kerjasama regional secara transparan dengan negara-negara Indo-Pasifik, hingga membuka dialog bersama dengan China dalam rangka mendorong penyelesaian konflik. Oleh karena itu, ASEAN menunjukkan bahwa AOIP bukan hanya sekedar kerangka kebijakan, akan tetapi melalui pendekatan tersebut ASEAN berupaya meredam konflik yang melibatkan perang China dan Taiwan, sehingga menyebabkan ketidakstabilan regional.

Motif strategis dan kepentingan nasional China yang mendasari klaim terhadap wilayah Taiwan

Perang saudara yang terjadi di China pada sekitaran tahun 1927-1949, mengakibatkan terpisahnya China menjadi dua yang dimana pada saat yang sama berdirilah Republik Rakyat China (RRC) yang mempunyai kendali atas China daratan yang pada akhirnya terbentuknya Republik China atau yang kita kenal sekarang sebagai Taiwan. Lebih lanjut, China selama berpuluh-puluh tahun telah membuat Taiwan untuk kembali masuk menjadi bagian dari mereka sebagai satu kesatuan, dikarenakan China beranggapan bahwa pulau yang menjadi okupansi dari Taiwan tersebut merupakan bagian dari wilayah China dan masuk ke dalam yurisdiksi mereka (Akhir Dari Perang Saudara China Dan Sejarah Berdirinya Taiwan, 2021).

Sejak saat itu, Taiwan secara sepihak membangun sistem kenegaraan mereka yang terdiri dari pemerintahan, pembentukan undang-undang domestik, hingga memiliki kepala negara dan angkatan bersenjata yang disertai militer (Mengapa Taiwan Tak Dianggap Sebagai Suatu Negara?, 2022). Lebih lanjut, pada tahun 1945-1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui adanya keberadaan suatu negara yang bernama Republik China tau yang dikenal resmi pada saat sekarang sebagai Taiwan. Bahkan pada saat tersebut, PBB mengakuinya sebagai salah satu anggota dari organisasi internasional tersebut. Oleh karena itu, selepas penjajahan Jepang yang diakhiri oleh Perang Dunia II, pada akhirnya status Republik China menjadi sebuah pertanyaan di PBB, apakah mereka masih menjadi satu China, atau sudah menjadi bagian yang terpisah secara sistem kenegaraan, pemerintahan, maupun yang lainnya.

Pada akhirnya, siding umum PBB pada tahun 1971 mengeluarkan sebuah resolusi 2758 tentang *Restoration of the lawful rights of the People ' s Republic of China in the United Nations* (United Nations, 1972). Resolusi ini menyatakan bahwasannya PBB hanya mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau yang kerap dikenal sebagai China, yang hanya menjadi perwakilan tunggal sebagai anggota di PBB, hingga tidak terdapatnya pengakuan Taiwan sebagai bagian dari sebuah negara yang baru terbentuk pada saat itu. Sehubungan dengan hal tersebut, akhirnya China mengeluarkan sebuah kebijakan mereka yang dikenal luas sekarang sebagai *One China Policy*.

Kebijakan satu China (*One China Policy*), merupakan terobosan dari China yang dimana mereka mengatakan bahwa posisi China hanya ada satu dalam pemerintahannya (*What Is the "One China" Policy? - BBC News, 2021*). Melalui kebijakan tersebut juga, dibawah kepemimpinan Amerika Serikat yaitu Jimmy Carter, hubungan dari China-Amerika mulai menjadi sangat kuat akibat dari salah satu kerjasama hubungan diplomatik dan saling mengakui yang diawali pada 1 Januari 1979 (*Jimmy Carter: The US President Who Became China's Friend, 2024*). Sebelumnya, Amerika Serikat hanya mengakui pemerintah Taiwan pada beberapa dekade sebelumnya, akan tetapi pengakuan Amerika Serikat melalui One China Policy menjadi sebuah kabar yang sangat gembira bagi China dan hal tersebut menjadi landasan dari hubungan China-Amerika Serikat.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, terdapat beberapa aspek kesepakatan yang berkaitan secara langsung dengan Tiongkok, diantaranya adalah Pengakuan China sebagai satu-satunya pemerintahan sah. Kemudian makna dari "Pengakuan" tersebut mendeskripsikan tentang posisi China dimana tidak mengakui bahwa Taiwan merupakan bagian dari kedaulatan China yang merujuk kepada prinsip *One China Policy*. Aspek selanjutnya, mengenai solusi apapun terhadap perbedaan lintas Selat akan diselesaikan secara damai. Di sisi lain, kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan mencakup hal-hal terkait pengakhiran Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1954. Bahkan, Washington mendefinisikan bahwa status pulau Taiwan "Belum ditentukan," dengan pemerintah yang berkuasa tidak dianggap sebagai negara berdaulat dalam sistem internasional. Dengan demikian, Amerika Serikat memiliki hak untuk menyediakan persenjataan pertahanan kepada Taiwan guna melawan segala bentuk penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat dikatakan menyebabkan pembahayaan terhadap keamanan,

maupun berupa ekonomi dan sistem sosial yang terkait erat bersamaan dengan rakyat Taiwan, hingga terdapatnya ketentuan bagi presiden dan Kongres untuk melakukan konsultasi terkait tindakan lebih lanjut jika terjadi ancaman terhadap Taiwan (*Understanding the One China Policy*, 2023).

Melihat kerjasama yang terjadi dan segala ketentuan di dalamnya, hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat guna untuk mereduksi atau mencegah adanya eskalasi yang sangat parah, yang mungkin di masa depan China berusaha untuk melakukan okupansi secara keseluruhan kepada Taiwan akibat dari adanya rasa kepemilikan mereka terhadap daerah yang dianggap oleh mereka sebagai kepemilikan dari mereka merujuk kepada sejarah yang diakibatkan oleh pemisahan dari perang saudara. Di samping itu, kepentingan nasional China tentu saja terlihat, apalagi jika kita melihat melalui hukum laut internasional yang dimana tentunya bebas untuk melakukan eksplorasi atau berlalu-lalang dibagian wilayah yang termasuk ke dalam yurisdiksi mereka. Oleh karena itu, motif strategis dan kepentingan nasional China dapat dijabarkan dengan lebih rinci di bawah ini:

A. Hukum Laut Domestik

Strategi China untuk menguatkan kepemilikan mereka terhadap Taiwan, sangat tercermin dengan jelas dalam pengertian dari kepentingan nasional. Kepentingan Nasional, berasal dari sebuah negara dengan tujuan dan ambisi yang dilakukan dengan tujuannya terkandung beberapa aspek yang diantaranya mencakup militer, ekonomi, budaya, maupun yang lainnya dalam rangka melakukan hubungan internasional (Bainus & Rachman, 2018). Lebih lanjut, strategi hukum domestik yang dibalut dengan kepentingan nasional China, membuat mereka menggunakan pendekatan Penjaga Pantai Tiongkok dan Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas Maritim dalam rangka memperkuat dasar blokade mereka (*PRC Uses Legal Warfare to Support Maritime Blockade Against Taiwan - Jamestown*, 2025). Bahkan, melalui pendekatan tersebut, China tidak hanya terbatas dalam mengerahkan Kapal Penjaga Pantai, akan tetapi mereka juga mengerahkan Angkatan Laut Tentara dalam rangka mencegak, menahan, hingga mengatur kapa lasing di perairan yang mereka persengketakan, hal ini juga mencakup eksplorasi kapal militer dari Taiwan, yang tentunya membuat pergerakan mereka sangat terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada 26 Februari 2025, China melaksanakan sebuah latihan militer yang disebut sebagai “*live-fire drills*” (*Taiwan*

Condemns China for “shooting” Drills off Taiwanese Coast | Reuters, 2025). Latihan militer ini secara hukum internasional dikatakan sah, dikarenakan China masih melakukan latihan di wilayah mereka, namun yang menjadi permasalahan adalah Taiwan yang merasa terancam akibat dari adanya latihan militer tersebut. Pasalnya, Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi terdapatnya kurang lebih 32 pesawat militer beserta kapal perangnya yang berada di wilayah Selat Taiwan. Melihat hal tersebut, sudah sangat jelas bahwasannya upaya China untuk merebut kembali wilayahnya sangat tercermin dengan bagaimana mereka dapat melakukan dominasi di sana dengan membuat pendekatan berupa memamerkan kekuatan mereka dalam konteks militer meskipun hanya berupa latihan.

B. Hukum Laut Internasional

Menurut (United Nations Convention on The Law of The Sea, 1982) tentang lintas damai pada pasal 17, mereka mengartikan bahwasannya kendaraan laut seperti halnya kapal yang berasal dari negara-negara lain, entah yang berasal dari pantai maupun yang bukan pantai, mempunyai keistimewaan dalam hak lintas damai sesuai yang diatur di dalam hukum internasional, UNCLOS. Sehubungan dengan hal tersebut, korelasi diantara latihan militer yang telah dilaksanakan oleh China, meskipun berapa di dekat perairan Taiwan, dapat dikatakan legal karena masih masuk ke dalam wilayah perairan berdasarkan yurisdiksi mereka (*MOFA Kecam Keras Latihan Militer Tiongkok, Desak Tiongkok Tidak Mencari-Cari Alasan Memicu Konflik, 2024*). Balasnya, Taiwan sendiri mengatakan hal yang sebaliknya, mereka mengatakan bahwasannya China berupaya untuk membuat sebuah perencanaan dari China dalam tindakan provokasi terhadap keamanan di Selat Taiwan, hingga menimbulkan ketidakstabilan pada kawasan disekitaran Indo-Pasifik.

Melalui pendekatan tersebut, China berupaya untuk menunjukkan sebesar apa kekuatan yang mereka miliki di perairan kawasan Indo-Pasifik, terkhususnya juga bahwa China masih menerapkan Kebijakan Satu China mereka hingga sekarang, meskipun hal tersebut dapat merusak perdamaian dan stabilitas regional.

Efektivitas AOIP dalam mekanisme regional dalam mencegah eskalasi konflik di Indo-Pasifik

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah organisasi tunggal di Asia Tenggara yang tentunya bersifat regional dan berdomisi di Jakarta, Indonesia. Organisasi pada awalnya didirikan pada 8 Agustus 1967 dengan hanya terdiri dari 5 negara, diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Namun, seiring berjalannya waktu, keanggotaan lainnya disusul oleh Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam (*About ASEAN - ASEAN Main Portal, 2025*).

Pada awal pembentukannya, ASEAN dibentuk sebagai struktur organisasi yang fokus utama ke bidang liberalisasi perdagangan dan integrasi ekonomi regional. Hal ini tercermin dari upaya ASEAN untuk membangun kawasan perdagangan bebas, seperti *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, yang pertama kali didirikan sejak disekitaran tahun 1992 dengan tujuan mengintegrasikan ekonomi negara-negara anggotanya melalui penghapusan tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Bahkan, ASEAN pada awalnya lebih menitikberatkan pada kerjasama ekonomi dan perdagangan daripada aspek hukum, institusional, atau politik yang lebih dalam (Jetschke, 2017).

Seiring berkembangnya organisasi regional ini, pada tahun 2019 lahirlah sebuah pendekatan baru dari ASEAN yang disebut sebagai *AOIP* yang telah menjadi acuan dari arus arah ASEAN sebagai aktor utama dalam rangka menjaga kawasan mereka dari berbagai benturan kekuatan-kekuatan yang berupaya melakukan dominasi, sehingga persaingan kepentingan di kawasan Indo-pasifik dapat menjadi sangat tajam (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Melalui ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan Dan Tantangan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Spesifiknya, merujuk kepada prinsip dari ASEAN melalui AOIP, pandangan ASEAN melalui Indo-Pasifik tentunya berdasarkan kepada pusat dari ASEAN, adanya transparansi, inklusivitas, keterbukaan dan kerangka yang berbasis peraturan, hingga penghormatan dan kepatuhan kepada hukum internasional, seperti contohnya yang terkandung dalam piagam PBB, UNCLOS 1982, hingga yang lainnya (ASEAN, 2019). Oleh karena itu, AOIP dari ASEAN ini berupaya menegaskan peran mereka sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik, terutama dari adanya ancaman, ketidakstabilan kekuatan, hingga mereduksi

konflik melalui serangkaian dialog dan kerjasama dibandingkan menekankan persaingan dalam rangka kemajuan kawasan.

Dalam pendekatannya, tentu saja AOIP tidak akan berjalan dengan efektif dan maksimal tanpa adanya bantuan dari negara-negara lain dalam rangka melaksanakan stabilitas di kawasan, sekaligus mencegah eskalasi yang lebih luas dari konflik China-Taiwan. Pasalnya, pada 6 September 2023 ketika diadopsinya AOIP ini melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-Amerika Serikat (*KTT Ke-11 ASEAN-AS Adopsi Dokumen Dukungan Kerja Sama Dalam AOIP*, 2023). Kerjasama ini bukan hanya melakukan pendekatan yang terbatas pada keamanan saja di Indo-Pasifik, akan tetapi melalui AOIP, kemitraan ini dapat meningkatkan ketahanan energi, pangan, dan mengatasi penghambatan dari perubahan iklim dan pembangunan negara berkembang. Lebih lanjut, komitmen ini juga menekankan bahwa Amerika-Serikat mendukung sentralitas dari ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan mereka.

Di sisi lain, tepat pada hari yang sama dari diadopsinya AOIP bersama dengan Amerika Serikat, Jepang juga melakukan hal yang sama dalam kemitraan strategis diantara ASEAN-Jepang melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN Jepang (*ASEAN-Jepang Sepakat Bentuk Kemitraan Strategis Komprehensif*, n.d.). Melalui konferensi ini, terdapat beberapa kesepakatan yang ditandai dengan ASEAN-Jepang sebagai teman dalam melakukan kerjasama, keberlanjutan ASEAN-Jepang ekonomi dalam hal sumber daya manusia, dan pengembangannya inovasi, serta *ASEAN-Japan Economic Co-Creation Vision*. Lebih lanjut, pada konferensi ini juga menekankan dengan keras bahwa, pemimpin negara penting dalam pengawasan situasi yang aman pada sekitaran kawasan, yang diawali dari Korea dan Laut China Selatan yang menjadi titik konflik yang sering diawali oleh China.

Meskipun telah membuat kerjasama dan kesepakatan dengan negara-negara besar, terdapat juga keterbatasan pengimplementasian AOIP, yang dimana AOIP menunjukkan bahwa meskipun dokumen ini tidak memiliki dimensi strategis yang kuat, AOIP berhasil mendapatkan dukungan dari mitra eksternal ASEAN karena sifatnya yang netral, tidak memihak, dan berfokus pada kerjasama daripada rivalitas (Lin, 2024b). Dukungan ini berasal dari berbagai negara seperti China, India, Jepang, AS, Australia, dan Korea Selatan, yang menganggap AOIP sebagai platform yang inklusif dan konstruktif dalam membangun hubungan regional.

Namun, AOIP memiliki keterbatasan signifikan dalam hal dampak strategis, terutama dalam mengelola ancaman eksternal dan ketegangan geopolitik, seperti yang dihadapi ASEAN terhadap China. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya dimensi strategis dan komponen kekuatan keras (*hard power*), sehingga tidak mampu secara efektif mencegah konflik atau menyeimbangkan kekuatan di kawasan. ASEAN cenderung menghindari sikap keras terhadap China terkait sengketa di Laut China Selatan dan Selat Taiwan, yang menyebabkan AOIP tidak mampu secara aktif mengatasi tantangan keamanan utama di kawasan. Oleh karena itu, ASEAN berusaha menjaga keseimbangan dan menghindari sikap yang memperburuk ketegangan dengan tidak secara terbuka mendukung salah satu pihak dalam konflik China-Taiwan (Lin, 2024b).

Dengan demikian, ASEAN berusaha menjaga keseimbangan dengan menghindari sikap yang terlalu condong ke salah satu pihak dan menekankan pentingnya penyelesaian damai serta dialog terbuka sebagai jalan keluar dari konflik. Oleh karena itu, AOIP berfungsi sebagai kerangka kerja yang mempromosikan kerjasama yang konstruktif dan stabil di kawasan Indo-Pasifik, dengan mengedepankan prinsip-prinsip multilateralitas dan penghormatan terhadap kedaulatan, sehingga berupaya mengurangi risiko eskalasi konflik yang lebih luas antara China dan Taiwan.

Namun, jika melihat efektivitas AOIP dalam mencegah eskalasi di Indo-Pasifik yang diakibatkan oleh China-Taiwan apakah benar-benar efektif dalam menghentikan dan mencegah secara utuh, tentu saja hal tersebut belum tercermin dengan jelas. Pasalnya, pada 21 Mei 2025, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China melakukan sebuah latihan militer amfibi secara besar-besaran dan membuat dunia internasional memunculkan kekhawatiran dikarenakan demonstrasi kekuatan yang dipunyai oleh China menyimbolkan akan terjadinya potensi eskalasi konflik di kawasan tersebut (China's Bold Amphibious Drill near Taiwan Sparks Global Alarm, 2025).

Meskipun Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya aktivitas militer China melalui latihannya, ASEAN sebagai pilar utama di dalam kawasan ini belum memberikan reaksi atau komentar apapun, meskipun latihan ini juga membuat blokade secara tidak langsung kepada jalur pelayaran internasional dikarenakan operasi militer berskala besar di sekitar Selat Taiwan tersebut.

E. Kesimpulan

Serangkaian kepentingan China yang berada di sekitaran Indo-Pasifik, terkhususnya di sekitaran Selat Taiwan, telah menyebabkan eskalasi berkelanjutan akibat dari operasi militer yang mereka lakukan dalam rangka menyebarkan threat kepada Taiwan. Melihat akan hal tersebut, China secara langsung dan tidak langsung menyebabkan struktur stabilitas keamanan Indo-Pasifik terganggu, sehingga banyak negara-negara yang turut andil masuk ke dalam konflik ini untuk melakukan stabilitas di kawasan ini.

Di sisi lain, Amerika, Jepang, hingga ASEAN melakukan serangkaian perjanjian dan kerjasama dalam rangka melakukan stabilitas di kawasan tersebut agar eskalasi yang diakibatkan oleh China tidak berlangsung dengan sangat panjang, yang pada akhirnya bisa saja berdampak kepada negara-negara lain di kawasan tersebut. Bahkan, AOIP yang berasal dari prinsip ASEAN dalam mengawasi keseimbangan kawasan mereka, sepertinya tidak dapat diimplementasikan secara efektif, hal ini merujuk kepada pengimplementasian AOIP tetap berjalan dari awal hingga sekarang akan tetapi tetap saja terjadi eskalasi.

Merujuk kepada perbedaan penyelesaian konflik dari beberapa presiden Amerika Serikat sebelumnya dalam memandang konflik ini sebagai bagian dari kepentingan mereka, dapat tercermin dengan sangat jelas. Pada tahun 1979, Jimmy Carter berupaya untuk melakukan normalisasi diantara China-Taiwan, akan tetapi dengan suatu syarat yaitu hanya China yang diakui. Sedangkan pada tahun 2021-2024, Joe Biden mempunyai serangkaian kepentingan untuk menekan China, seperti halnya pernyataan dalam mendukung Taiwan, hingga penjualan senjata, penguatan kerja sama di kawasan. Sedangkan Trump pada tahun 2025, melakukan hal yang sangat strategis dengan meningkatkan tarif impor kepada China agar mereka secara tidak langsung berfokus kepada urgensi perdagangan mereka dibandingkan konflik ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Agastia, I. G. B. D. (2020). Understanding Indonesia's role in the 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific': A role theory approach. *Asia and the Pacific Policy*

Studies, 7(3), 293–305.
<https://doi.org/10.1002/APP5.308;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:20502680;WGROU:STRING:PUBLICATION>

Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Editorial: Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 109–115. <https://doi.org/10.24198/INTERMESTIC.V2N2.1>

Berkofsky, A., & Miracola, S. (2019). *Geopolitics by other means*. Ledizioni - LediPublishing. <https://doi.org/10.14672/67059287>

Centre for Strategic and International Studies. (2020). Ideological Security as National Security. *Comparative Government*, 52–59. https://doi.org/10.1007/978-1-349-15318-3_7

Giri, N. (n.d.). *Balance of Power Theory in Present International System*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19997.64489>

Jetschke, A. (2017). What Drives Institutional Reforms in Regional Organisations? Diffusion, Contextual Conditions, and the Modular Design of ASEAN. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 5(1), 173–196. <https://doi.org/10.1017/TRN.2016.30>

Maulana, I., Islamy, F., Baiquni, M. I., Hanafie, N. K., Rahman, R., & Muin, F. (2023). Asean's Role in The Settlement of International Disputes on China's Aggression Against Taiwan. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 3(2), 139–149. <https://doi.org/10.31000/IJLP.V3I2.7145>

Wardhana, R. S. (2021). The South China Sea Conflict and Security Cooperation in ASEAN Waters. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 3(1), 23–33. <https://doi.org/10.29303/IJPSS.V3I1.56>

Artikel Website

Akhir dari Perang Saudara China dan Sejarah Berdirinya Taiwan. (n.d.). Retrieved May 23, 2025, from <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/30/114334970/akhir-dari-perang-saudara-china-dan-sejarah-berdirinya-taiwan?page=all>

ASEAN: Pengertian, Negara Anggota, Sejarah dan Tujuan. (n.d.). Retrieved April 18, 2025, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719171803-4-356822/asean-pengertian-negara-anggota-sejarah-dan-tujuan>

China's bold amphibious drill near Taiwan sparks global alarm. (n.d.). Retrieved May 25, 2025, from <https://bulgarianmilitary.com/2025/05/21/chinas-bold-amphibious-drill-near-taiwan-sparks-global-alarm/>

Confrontation Over Taiwan | Global Conflict Tracker. (n.d.). Retrieved April 19, 2025, from <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/confrontation-over-taiwan>

Defending Taiwan – Indo-Pacific Defense FORUM. (2024, November 12). <https://ipdefenseforum.com/2024/11/defending-taiwan/>

Mengapa Taiwan Tak Dianggap sebagai Suatu Negara? (n.d.). Retrieved May 23, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220904071709-113-842940/mengapa-taiwan-tak-dianggap-sebagai-suatu-negara>

MOFA Kecam Keras Latihan Militer Tiongkok, Desak Tiongkok Tidak Mencari-Cari Alasan Memicu Konflik. (2024). <https://id.taiwantoday.tw/politik/260223/mofa-kecam-keras-latihan-militer-tiongkok,-desak-tiongkok-tidak-mencari-cari-alasan-memicu-konflik>

MOFA: Speech by H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, at the Parliament of the Republic of India “Confluence of the Two Seas” (August 22, 2007). (2007). <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>

PRC Uses Legal Warfare to Support Maritime Blockade Against Taiwan - Jamestown. (2025, March 15). <https://jamestown.org/program/prc-uses-legal-warfare-to-support-maritime-blockade-against-taiwan/>

Taiwan condemns China for “shooting” drills off Taiwanese coast | Reuters. (2025, February 26). <https://www.reuters.com/world/china/taiwan-flags-chinas-shooting-drills-off-southwest-coast-2025-02-26/>

Taiwan Relations Act (Public Law 96-8, 22 U.S.C. 3301 et seq.) - American Institute in Taiwan. (2022, March 30). <https://www.ait.org.tw/taiwan-relations-act-public-law-96-8-22-u-s-c-3301-et-seq/>

Understanding the One China policy. (2023, August 31). <https://www.brookings.edu/articles/understanding-the-one-china-policy/>

What is the “One China” policy? - BBC News. (2021). <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38285354>

Buku

Yadav;, A. S. (2022a). *Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik.* Elex Media Komputindo.
[//perpustakaan.kemendagri.go.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8322](http://perpustakaan.kemendagri.go.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8322)

Yadav;, A. S. (2022b). *Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik.* Elex Media Komputindo.
[//perpustakaan.kemendagri.go.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8322](http://perpustakaan.kemendagri.go.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8322)

Yadav;, A. S. (2022c). *Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik.* Elex Media Komputindo.
[//perpustakaan.kemendagri.go.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8322](http://perpustakaan.kemendagri.go.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8322)

Dokumen & Pernyataan

ASEAN-Jepang Sepakat Bentuk Kemitraan Strategis Komprehensif. (n.d.). Retrieved May 25, 2025, from <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/asean-jepang-sepakat-bentuk-kemitraan-strategis-komprehensif/>

ASEAN-U.S. Leaders' Statement on Cooperation on The ASEAN Outlook on The Indo-Pacific - ASEAN Main Portal. (2023, September 6). <https://asean.org/asean-u-s-leaders-statement-on-cooperation-on-the-asean-outlook-on-the-indo-pacific/>

“ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC.” (n.d.).

ASEAN: Pengertian, Negara Anggota, Sejarah dan Tujuan. (n.d.). Retrieved April 18, 2025, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719171803-4-356822/asean-pengertian-negara-anggota-sejarah-dan-tujuan>

KTT Ke-11 ASEAN-AS Adopsi Dokumen Dukungan Kerja Sama dalam AOIP. (2023). <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/ktt-ke-11-asean-as-adopsi-dokumen-dukungan-kerja-sama-dalam-aoip/>

Lin, J. (2024a). 2024/9 “*Advancing the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Beyond Indonesia's Chairmanship*” by Joanne Lin. /articles-commentaries/iseas-perspective/2024-9-advancing-the-asean-outlook-on-the-indo-pacific-beyond-indonesias-chairmanship-joanne-lin/

Lin, J. (2024b). 2024/9 “*Advancing the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Beyond Indonesia's Chairmanship*” by Joanne Lin (Vol. 2024, Issue No. 9). /articles-commentaries/iseas-perspective/2024-9-advancing-the-asean-outlook-on-the-indo-pacific-beyond-indonesias-chairmanship-joanne-lin/

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Melalui ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan dan Tantangan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). <https://setkab.go.id/implementasi-asean-outlook-on-the-indo-pacific-melalui-asean-indo-pacific-forum-2023-kemanfaatan-dan-tantangan/>

United Nations Convention on the Law of the Sea. (n.d.). Retrieved May 23, 2025, from https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part2.htm

UN. G. A. (26th sess. : (1972). *Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations.* <https://digitallibrary.un.org/record/192054>